



**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LAKIP)  
TAHUN 2018  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

**DISUSUN OLEH:**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Gunung Tua-Padangsidempuan Km. 3 Telp (0635) 510825, Fax. (0635) 510825, E-mail.

**GUNUNG TUA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 – 2018, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan TAP MPR Nomor XI / MPR / 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor : 7/1999 tentang AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), menginstruksikan kepada setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir periode Tahun Anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban pimpinan satuan kerja instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan. Akuntabilitas Kinerja didukung dengan satu sistem yang disebut SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 ini merupakan salah satu sistem penilaian capaian kinerja yang telah dilaksanakan sebagai salah satu SKPD yang ada di Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara selama periode Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun;

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditetapkan adalah "**MEWUJUDKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG WAJAR**".

Dijabarkan menjadi 3 (tiga) misi, yaitu :

Optimalisasi Pendapatan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan.

Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah (LAKIP).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Gunungtua, Januari 2019

KEPALA BADAN PKPAD



HAHOLONGAN SIREGAR, SE, MM

NIP. 19690815 199803 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftas Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	2
3. Organisasi	3
B. Kewenangan yang diberikan pada Instansi	6
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	6
2. Aspek-aspek Strategik Organisasi	6
3. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. Rencana Strategis	8
a. Visi dan Misi	9
b. Tujuan Strategis	10
c. Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah	11
d. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran	12
2. Penetapan Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. Pengukuran Capaian Kinerja	27
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	32
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	45
2. Langkah Ke Depan	46
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pertanggungjawaban suatu Satuan Kerja Instansi Pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan Daerah melainkan juga merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pengukuran Kinerja yang telah direncanakan adalah merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai apakah organisasi dan manajemen dalam melaksanakan kagiatannya melayani publik telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Evaluasi Kinerja merupakan dilakukannya perbandingan kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kerja nyata yang direncanakan, dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, dengan kinerja instansi pemerintah yang lain atau swasta yang unggul, dengan kinerja nyata instansi pemerintah daerah lain atau standar nasional yang mencakup efisiensi dan efektivitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja bukanlah sekedar menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan telah sesuai dengan perencanaan, akan tetapi menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, berhasil guna dan telah berdaya guna.

Laporan Akuntabilitas Kinerja haruslah jujur, objektif, akurat dan transparan sehingga memuat informasi yang proporsional dalam lingkup kinerja dan tanggungjawab yang memuat kegagalan dan keberhasilan. Informasi yang disajikan juga yang sifatnya penting serta relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggungjawaban sehingga pada akhirnya manfaat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja itu lebih besar dari pada biaya penyusunannya dan untuk peningkatan pencapaian kinerja dimasa yang akan datang.

Adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berdaya banding tinggi (reliable) dan berdaya uji (verifiable) merupakan satu faktor utama berhasilnya suatu instansi/organisasi pemerintah.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Padang Lawas Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016, memiliki 2 (dua) tugas penting yang bersifat integral didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu : Menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Strategik Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 – 2018, dengan asumsi bahwa target yang telah ditetapkan secara optimal harus bisa dicapai, dan secara Struktural sebagai perangkat daerah dituntut pula untuk menunjang pencapaian Visi Bupati Padang Lawas Utara “Mewujudkan Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju dan beradat” yang secara proporsional ditetapkan dalam APBD Padang Lawas Utara pada setiap tahunnya. Pencapaian Visi Padang Lawas Utara ini diwujudkan secara bertahap melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara periode 2013 – 2018 yaitu “Mewujudkan Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju dan beradat”.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dijelaskan dalam Renstra adalah **“MEWUJUDKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG WAJAR DAN TRANSPARAN”**.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 4 misi, 5 tujuan, 7 sasaran yang selanjutnya dituangkan ke dalam 6 Kebijakan dan 9 program. Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Rencana Strategik Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Padang Lawas Utara, maka sebagai acuan utama yang harus dipegang oleh para pemeran organisasi adalah rumusan yang menjadi tujuan dan sasaran selama tahun 2018 yang pada dasarnya juga merupakan bagian Rencana Strategik tahun 2014 – 2018 yaitu :

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya pelaksanaan penataan kelembagaan organisasi	a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dan penggunaan anggaran yang seimbang yang berorientasi pada kepentingan publik.
	b. Mewujudkan optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah terutama dari komponen Pendapatan Asli Daerah yakni

Tujuan	Sasaran
	Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
	c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Asset
2. Meningkatnya pelaksanaan penataan pelayanan administrasi perkantoran	d. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang akuntabel dan profesional.
3. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	e. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas Aparatur sesuai dengan tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.
4. Meningkatnya pengembangan sistem pengendalian manajemen	f. Meningkatnya Kinerja SKPD.
5. Meningkatnya kualitas penyajian laporan keuangan daerah	g. Meningkatnya kualitas dan efektifitas pelaporan keuangan.

Pelaksanaan Kinerja Tahun 2018 dari 4 misi, 5 tujuan, 7 sasaran dan 6 kebijakan tersebut dalam proses perjalanannya dapat dilaksanakan 9 Program dengan 40 Kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi internal dengan melakukan Pengukuran Pencapaian Sasaran terhadap 7 sasaran dengan 7 indikator sasaran yaitu :

1. Ranperda APBD tepat waktu.
2. Perda APBD tepat waktu.
3. Persentase Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah.
4. Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah.
5. Persentase Efisiensi Belanja.
6. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.
7. Persentase pegawai yang memiliki kualifikasi S1 Akuntansi.

Maka untuk Rencana Tingkat Capaian, Realisasi Persentase Rencana Tingkat Capaian, dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah

Kegiatan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah sudah dilaksanakan dengan menyerap dana 98,22% dengan realisasi 100% dalam tahap pembuatan Ranperda. Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan efisien dan sesuai harapan.

Kelompok sasaran kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.			
Indikator	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
Masukan : Tersedianya Dana	1.683.872.000,00	1.368.531.300,00	81,27
Keluaran : 1. . Penetapan SKPd dan SKRd. 2. . Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 3. . Pengembangan dan Pemutakhiran Data Objek PBB- P2 4. . Promosi Peningkatan Pendapatan Daerah	1	1	100%
Hasil yang dicapai : 1. . Pendapatan Daerah dapat meningkat dengan optimal.	95%	95%	95%

5. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang diharapkan adalah tersusunnya penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Padang Lawas Utara Per Tahun Anggaran.

Kelompok sasaran kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.			
Indikator	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
Masukan : Tersedianya Dana	1.188.350.000,00	1.164.692.100,00	98,01
Keluaran :  1. Terbitnya Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2018 dan Perubahan APBD TA. 2018.  2. Terbitnya Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2018 dan Perubahan Penjabaran APBD TA. 2018.	4	4	100%
Hasil yang dicapai : OPD/unit kerja dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan Perbub tentang Penjabaran APBD serta memungkinkan pengendalian anggaran per program/kegiatan.	95%	95%	95%

6. Persentase Realisasi Belanja Langsung terhadap total Belanja

Rasio Realisasi Belanja Langsung terhadap total Belanja adalah sebesar 66,26%

Kelompok sasaran kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.			
Indikator	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	% tase
Persentase Realisasi Belanja Langsung terhadap Total Belanja	11.291.880.669,00	7.482.230.999,00	66,26

7. Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja

Rasio realisasi belanja tidak langsung terhadap total belanja adalah sebesar 33,73%.

Kelompok sasaran kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.			
Indikator	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	% tase
Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Tidak Langsung	11.291.880.669,00	3.809.649.670,00	33,73

8. Persentase Efisiensi Belanja

Kelompok sasaran kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.			
Indikator	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase

Persentase efisiensi belanja	12.128.761.213,50	11.291.880.669,00	93,10
------------------------------	-------------------	-------------------	-------

9. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun 2017 adalah dengan hasil WTP, dengan tercapainya hasil tersebut dikarenakan adanya kerja keras dan kerjasama yang baik. Kedepan diharapkan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal raihan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).